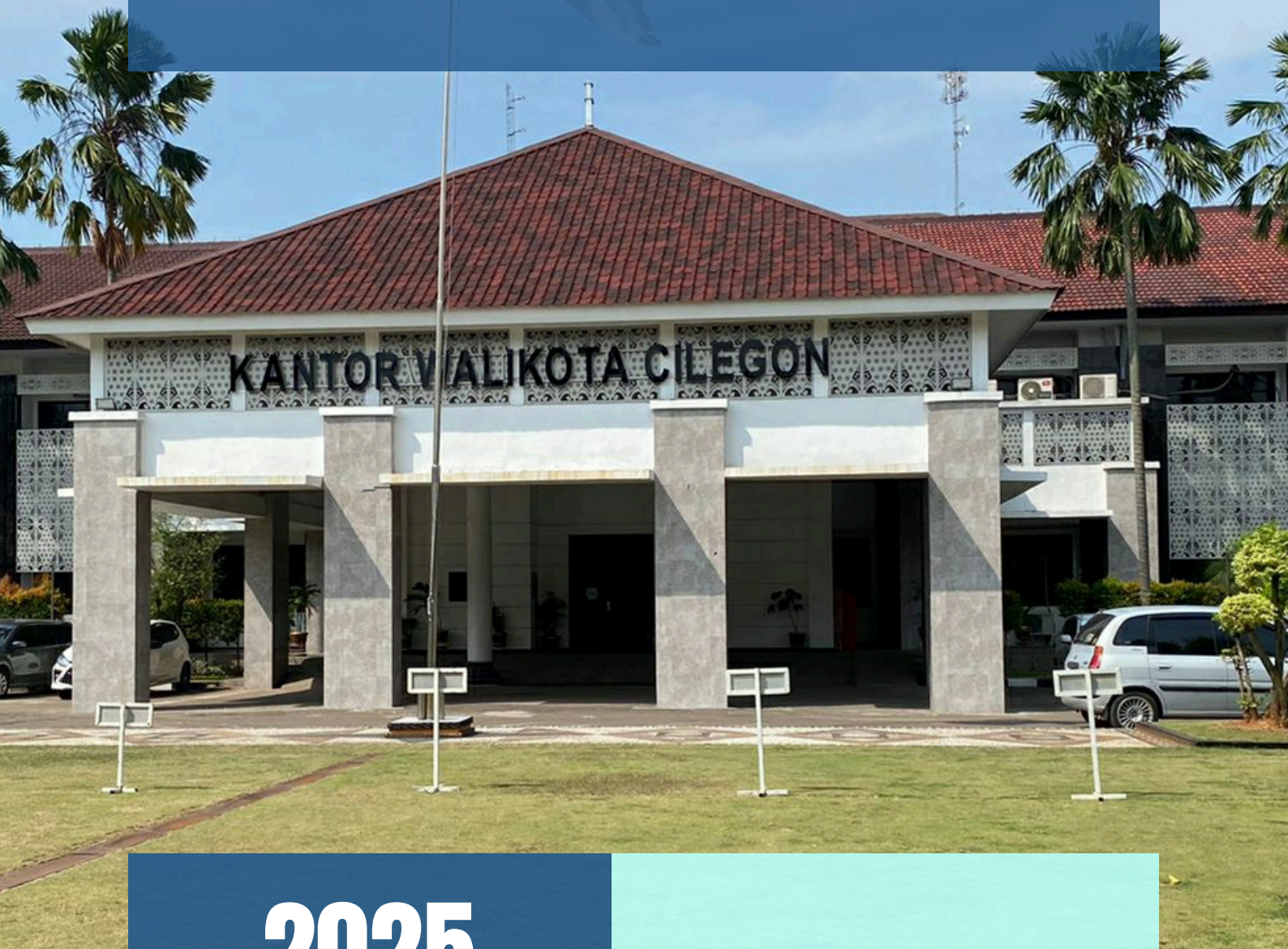


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



2025

PEMERINTAH KOTA CILEGON



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi atas kinerja pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon selama Tahun 2025.

Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas layanan informasi publik di Kota Cilegon. Laporan ini memuat capaian, prestasi, tantangan dan rencana kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya kami dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi publik.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMASI,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA CILEGON



AGUS ZULKARNAIN, S.STP, M.Si
NIP. 19770811 199701 1 001



DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

1

**Gambaran Umum Kebijakan Layanan
Informasi Publik**

3

**Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik**

5

**Rincian Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2025**



DAFTAR ISI

8

**Jangka Waktu Penyelesaian
Permohonan Informasi Publik**

18

**Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik**

19

**Kendala Eksternal dan Internal dalam
Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

20

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

21

Lampiran-lampiran



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan layanan informasi publik pada Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008, maka setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan. UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapat akses informasi.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cilegon menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik dan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menyusun dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai pedoman pelayanan dan pengolahan informasi. Dengan penetapan SOP tersebut diharapkan seluruh Pelayanan Informasi Publik baik dilingkup PPID Utama maupun PPID Pelaksana dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

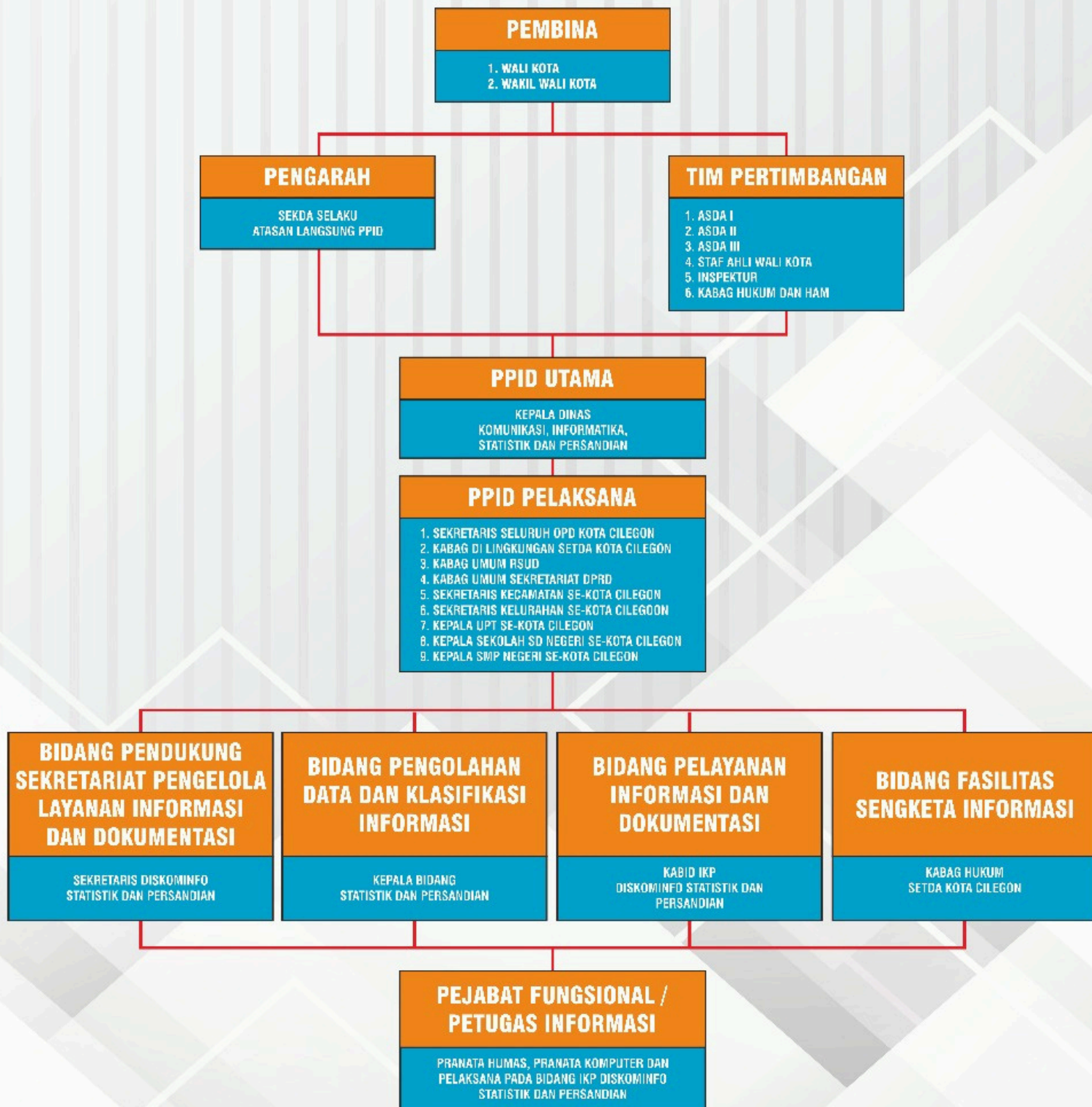


STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA CILEGON



DISKOMINFO
KOTA CILEGON





GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Hari pelayanan PPID Kota Cilegon yakni setiap Senin-Jumat dengan jam pelayanan pukul 09.00-15.00 WIB, melalui:

- Laman: <https://ppid.cilegon.go.id> atau ppid-cilegon.com.
- Pengiriman Surat Elektronik ke alamat: cilegonppid48@gmail.com atau melalui Pos yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cilegon selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon, beralamat di Lingkungan Perkantoran Kantor Wali Kota Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No.2 – Cilegon.
- Datang langsung ke ruang layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Gedung Kantor Wali Kota Cilegon Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman No.2 – Cilegon.

Untuk mengakomodasi Permohonan Informasi Publik secara tatap muka, PPID Kota Cilegon menyediakan Ruang Layanan Informasi. Prasarana yang tersedia di Ruang Layanan Informasi antara lain:

- Meja layanan informasi
- Kursi dan Sofa
- Laptop dan Personal Computer
- Printer
- Lemari Arsip
- Buku Bacaan (koran, buletin, buku dll)
- Buku PPID Kota Cilegon

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik oleh PPID Kota Cilegon melibatkan staf Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kota Cilegon. Pada Ruang Pelayanan Informasi Publik telah menempatkan satu orang petugas layanan informasi. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kota Cilegon dibantu oleh PPID Pelaksana yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 420.05/Kep.69-Diskominfo/2023 tentang Penetapan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

3. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

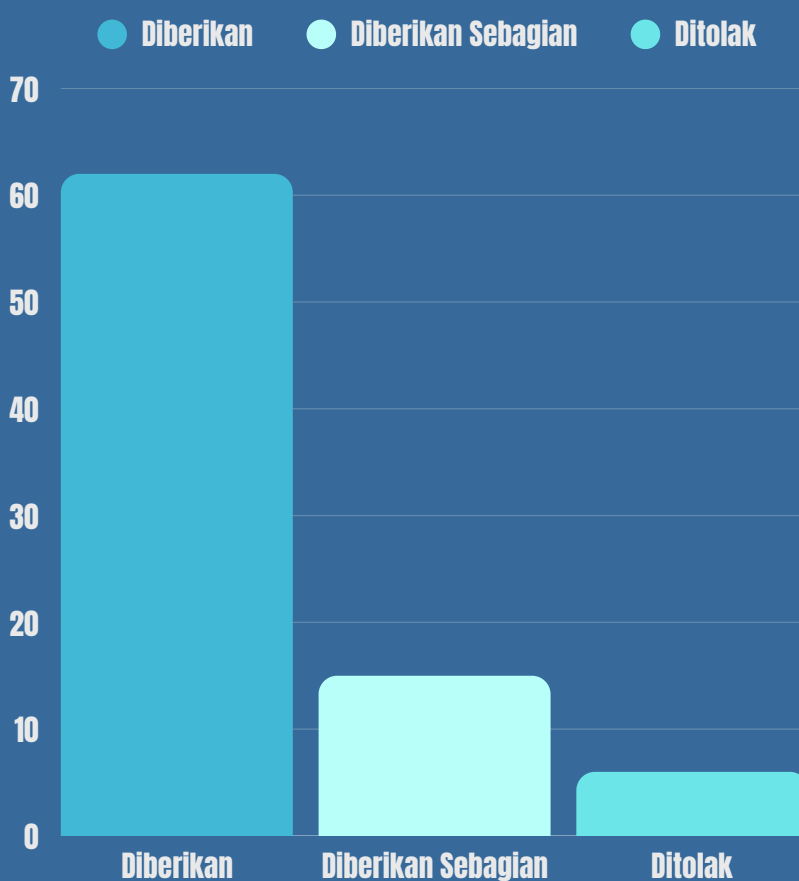
Seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 dari sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik.





RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

KEPUTUSAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025

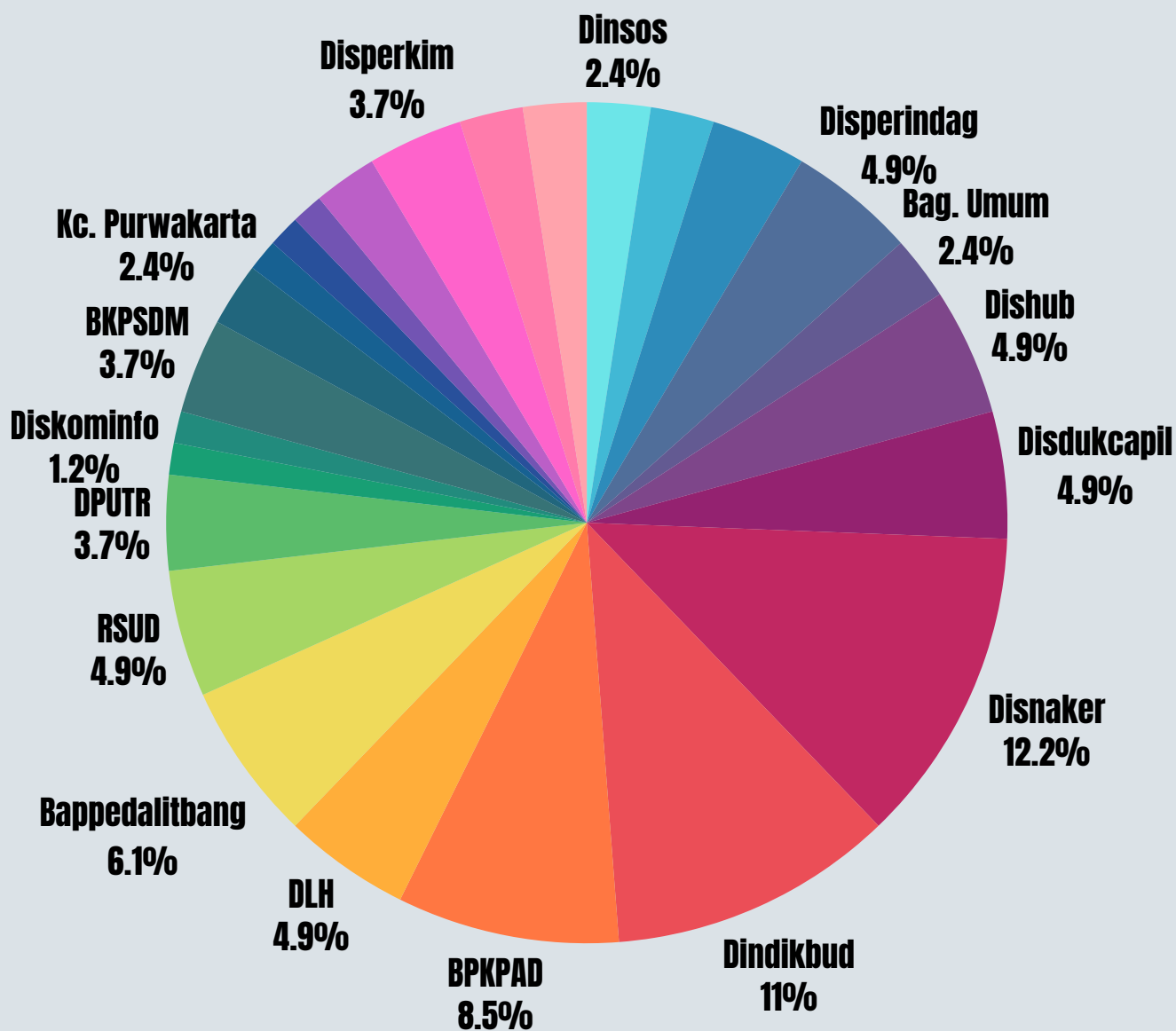


Keterangan :
Diberikan : 62
Diberikan Sebagian: 15
Ditolak : 6

Total Permohonan Informasi Tahun 2025 berjumlah 83 permohonan

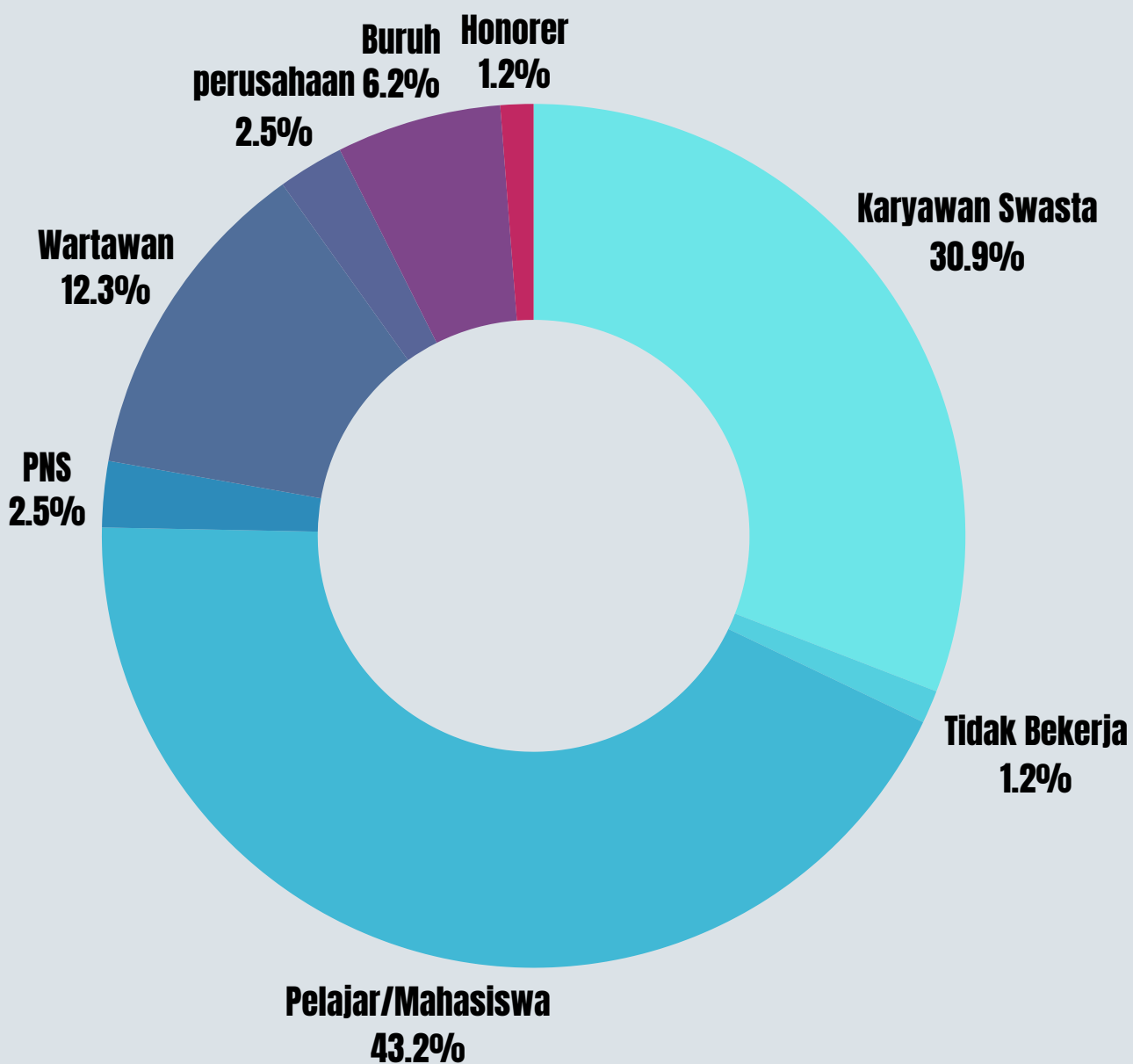


TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2025





PROFESI PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



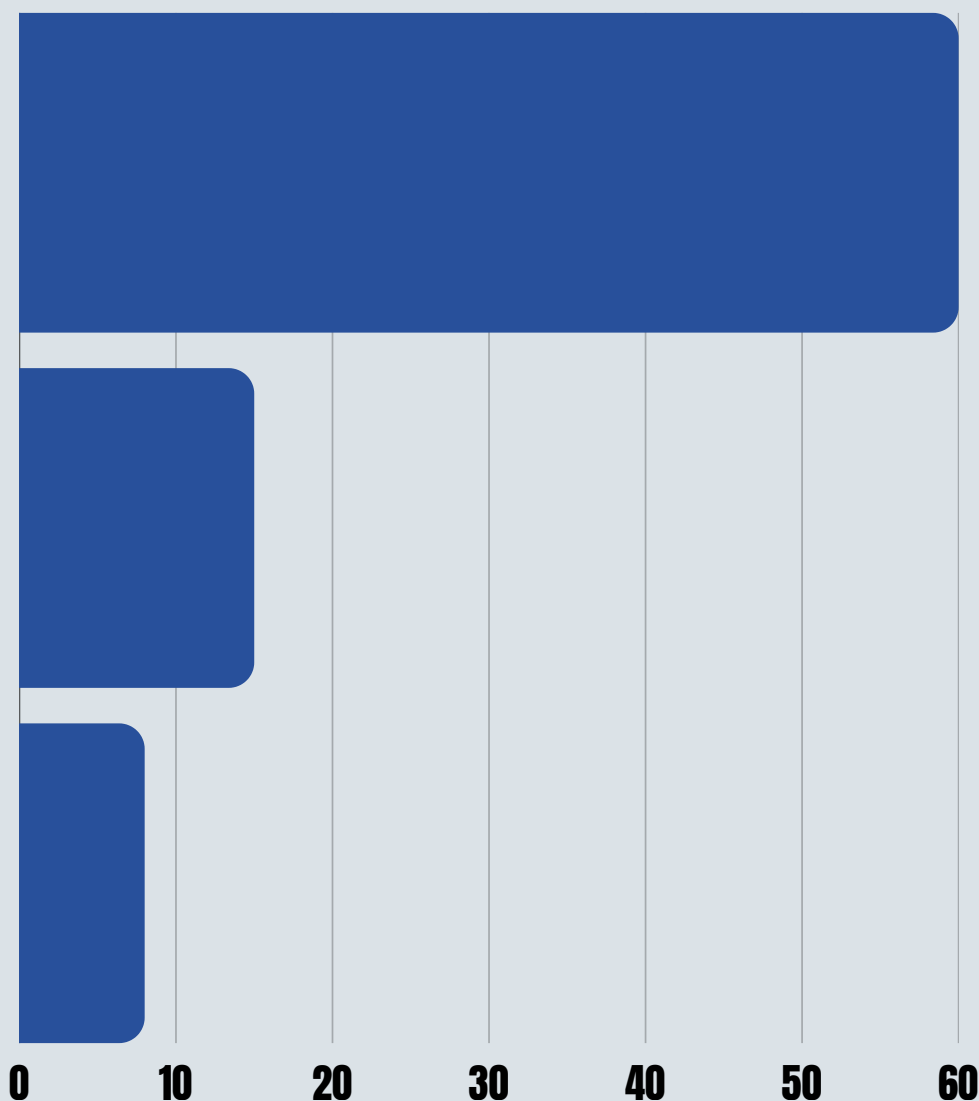


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

1-7 hari kerja

7-10 hari kerja

>10 hari kerja





8	PPID-345C	07/01/2025	Fira Anggraeni	Mahasiswa	Data pseudohack kota Cilegon berdasarkan mata pencaharian tahun 2024.	Unik data pendamping dalam tugas akhir (skripsi)	Diberikan	15 Januari 2025	Dinas Kependidikan dan Peningkatan Segi Kota Cilegon
9	PPID-775B	08/01/2025	Ana Nurjama	Karyawan	lap/ha per desember 2024 saya baru saja selesai keunak PKWT pertahun yang sudah diperganjang terus menurut sebanyak 4 kali total sy bekerja adalah 5 tahun di perusahaan tersebut. pertanyaan saya adalah, apa saja hak saya yang perlu dipenuhi oleh perusahaan, pasal dan bunyinya utk saya terangkan ke hr di saya. sejauh ini hanya gaji bulanan terakhir yg sy terima (gaji desember).	Unik menambah pengetahuan dan alat saya terhadap ke HRD perusahaan	Diberikan	09 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
10	PPID-1326D	10/01/2025	Annisa Dhyah Waryuni	PNS	Informasi tentang Beasiswa Pendidikan Anak saya yang sudah diterima di PTN UNDP, atas nama Muhammad Alih Ninda, Kelurahan Cilegon, 13 Juni 2004, asal sekolah SMA CMBRS Pandégang. Sudah pernah mengajukan permohonan secara manual tahun 2022. belum ada kabar berikutnya. ketika membuka APLIKASI Si Cerdas juga mengalami kesulitan daftar akun saya. Mohon penercahan tindak lanjutnya.	Keuntungan Menghimbau saya yang bertanggung jawab penuh atas pengajuan beasiswa pendidikan anak saya untuk mendaftar ulang kuliah, padahal sudah diterima di PTN yaitu di UNDP Semarang, sedangkan butuh biaya banyak. Data alhamdulillah IPK anak saya di atas 3.	Diberikan	15 Januari 2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
11	PPID-524A	10/01/2025	Mala Tadaryatunufus	Mahasiswa	Kondisi ketahanan pangan di tahun 2025 saat ini	Unik keperluan dokumen lampiran skripsi	Diberikan	05 Februari 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Cilegon
12	PPID-8920C	15/01/2025	Ananda Rizwan	Pelajar/Mahasiswa	Soft copy AK-1	Soft file hilang	Diberikan	15 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
13	PPID-4632D	15/01/2025	Margareta Siilagan	Karyawan Swasta	SOP terkait resign/ pengunduran diri dari instansi swasta (Rumah Sakit) dalam masa kerja 2 th 4 bulan, maksimal dalam kurun waktu berapa.	Unik kebutuhan proses resign	Diberikan	16 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon
14	PPID-214B	16/01/2025	Lia Ningih		Peraturan Kepala Daerah tentang Pelembagaan APBD Tahun 2025 beserta lampirannya	Data tersebut akan dipergunakan untuk keperluan kajian dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon	Diberikan	09-Apr-25	BPNPAD
15	PPID-4423E	20/01/2025	Mohammad Dimas Adhitya	Mahasiswa	Saya sendiri mau buat PT pererangan	Saya mau membuat PT pererangan	Ditolak	22 Januari 2025	Disperindag
16	PPID-8130D	21/01/2025	Adida Triksani	Mahasiswa	dokumen reunita terbaru dan tabel jumlah petugas dinas lingkungan hidup kota cilegon	data skripsi	Diberikan	31 Januari 2025	DLH
17	PPID-411A	22/01/2025	Wawan Kurniadi	Wartawan	Dokumen STOK yang berlaku	Pengelolaan	Diberikan	11 Februari 2025	Badanpalitbang
18	PPID-4469B	23/01/2025	adida triksani	Mahasiswa	Laporan kinerja dinas lingkungan hidup kota cilegon tahun 2023	skripsi	Diberikan	31 Januari 2025	DLH
19	PPID-2265C	06/02/2025	Anindya Fatma	Mahasiswa	Meminta list lengkap mengenai Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Berprestasi di Kota Cilegon. Data Nilai Rata-Rata Sekolah Menengah Atas (SMA) Berprestasi di Kota Cilegon dan Data Nilai Akreditasi Sekolah	Tidak menguasai dan dasar akan untuk meminta informasi tersebut ke PPID Banten	Ditolak	10 Februari 2025	Dindikbud
20	PPID-526E	10/02/2025	Wawan Kurniadi	Wartawan	Dokumen Renja th 2025 dan Dokumen DPA Th 2025	Pengelolaan	Diberikan	26 Februari 2025	Badanpalitbang
21	PPID-4626D	10/02/2025	Wawan Kurniadi	Wartawan	Dokumen AMDAL RSUD Cilegon	Pengelolaan	Diberikan	Maret 2025	RSUD
22	PPID-1066D	14/02/2025	Zasia Mizaldolpa	Mahasiswa	Data Tenaga Kerja Persewaan di Kota Cilegon, dengan korakerenribel: 1. Persewaan 2. Bekerja 3. Sudah menikah 4. Sudah memiliki anak (tidak wajib)	Informasi data tersebut akan saya gunakan sebagai populasi dalam penelitian yang berjudul "Persewaan dan Bekerja di Kota Cilegon: Studi Kasus di Kecamatan Kauragan Pada Ibu Bekerja"	Diberikan	21 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

35	PPID-630B	09/03/2025	Iva Farida Nidmi	Pelajar/Mahasiswa	Laporan kemajuan pelaksanaan survei di lingkungan PTU Surabaya Jawa 2025 meliputi LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas	Diajukan untuk lampiran tugas akhir. Mohon bantuannya baik saya ingin cepat lulus?	Diberikan sebagian	Ada yang ingin ditanyakan mengenai informasi yang dikumpulkan	08 Mei 2025	Kec Purwakarta
36	PPID-189C	09/04/2025	Fauzi	Pelajar/Mahasiswa	Lowongan pekerjaan	Meningkatkan number daya manusia	diberikan informasi		11 April 2025	Dindikbud
37	PPID-995A	21/04/2025	Dwi Riyanti	Mahasiswa	1. Jumlah data Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dalam lingkungan Pemerintah Kota Cilengon 2023-2025. 2. Jumlah data Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Cilengon 2023-2025. 3. Bagaimana pendapat di lingkungan Pemerintah Kota Cilengon Non Pegawai Negeri Sipil perempuan yang telah bekerja selama 5/10 tahun	Untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dengan topik penelitian fenomena glass ceiling di lingkungan pemerintahan, diperlukan hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam karya tulis skripsi.	Diberikan	30 April 2025	BRPSDM	
38	PPID-1448D	21/04/2025	Dwi Riyanti	Mahasiswa	1. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Cilengon Tahun 2. Jumlah data Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki pada Dinas Pendidikan Kota Cilengon. 3. Jumlah data seluruh Non Pegawai Negeri Sipil perempuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilengon	Data informasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai permasalahan penelitian yang sedang dihadapi dengan topik penelitian Fenomena Glass Ceiling dalam jabatan Struktural sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam karya tulis skripsi.	Diberikan	08 Mei 2025	Dindikbud	
39	PPID-1448D	21/04/2025	Dwi Riyanti	Mahasiswa	1. Struktur organisasi Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Cilengon Tahun 2. Jumlah data Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki pada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Cilengon. 3. Jumlah data seluruh Non Pegawai Negeri Sipil perempuan pada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Cilengon	Data informasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dengan topik penelitian Fenomena Glass Ceiling dalam jabatan Struktural sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam karya tulis skripsi.	Diberikan	08 Mei 2025	Dindikbud	
40	PPID-430B	21/04/2025	Dwi Riyanti	Mahasiswa	1. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilengon. 2. Jumlah data Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilengon. 3. Jumlah data seluruh Non-Pegawai Negeri Sipil perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilengon	Data informasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dengan topik penelitian Fenomena Glass Ceiling dalam jabatan struktural sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam karya tulis skripsi	Diberikan	28 Maret 2025	DP3AP2KRI	
41	PPID-1497E	22/04/2025	Nadyatri Andini Putri	Pelajar/Mahasiswa	Ingin melakukan proses permohonan untuk me-review dokumen Widang Test untuk proyek PTU Surabaya Jawa 98.10	Membutuhkan approval (tanda tangan) pihak DISAMKR untuk kepastian dokumen proyek PTU Surabaya Jawa 98.10	Diberikan		02 Mei 2025	Dumaker
42	PPID-1111E	22/04/2025	Wawan Kurniadi	Wartawan	Jumlah kendaraan (operasional) roda empat aktif & tidak aktif di seluruh OPD	Data publikasi	Diberikan sebagian		06 Mei 2025	BPKPAD
43	PPID-322A	22/04/2025	Wawan Kurniadi	Wartawan	Jumlah total Kendaraan operasional roda dua dan roda empat	Data publikasi	Diberikan sebagian		06 Mei 2025	Setwan
44	PPID-306E	24/04/2025	Muhammad Asyraf Hakim	Pelajar/Mahasiswa	Daftar/indikator yang ada di kota cilengon	Untuk skripsi	Diberikan		06 Mei 2025	Diperindag
45	PPID-455D	25/04/2025	Muhammad Asyraf Hakim	Pelajar/Mahasiswa	Daftar perusahaan industri di kota cilengon	Untuk skripsi	Diberikan		06 Mei 2025	Diperindag

46	PPID-743A	25/04/2025	M Ilham al Fahresi	Buruh Harian Lepas	Halper/Instansi	mendapatkan pekerjaan yang lebih layak	memastikan pekerjaan yang lebih layak		28 Mei 2025	Ditahkapi
47	PPID-323D	30/04/2025	Faisal Anwar	Karyawan Swasta	usudapatkan bibit/judikan ayam petelur dan pedaging di daerah Cilegon	untuk di emakkan	Diberikan	Diberikan	02 Mei 2025	DKRPD
48	PPID-1902A	15/05/2025	Tb Aji Fathallah	Karyawan Swasta	Penyediaan Makan dan Minum Rapat dari Tahun Anggaran 2022-2024. 1.Meminta Salinan RAB pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024.[Terlampir] 2.Meminta Salinan Kwitansi Pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024. 3.Meminta Dokumentasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024. 4.Meminta nama perusahaan yg terlelistasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024. 5.Meminta judul dan jenis nya pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024. 7.	memastikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengetahui hasil dari badan publik yang telah dilaksanakan.	Diberikan	Diberikan	28 Mei 2025	Rappedalibang
49	PPID-375A	16/05/2025	Wawan Kurniaib	Wartawan	Perihal jenis pengadaan operasional roda empat th 2025 dan penyedia	Data publisasi	Diberikan sebagian	Diberikan sebagian	03 Juni 2025	Kec Purwasikerta
50	PPID-1169B	19/05/2025	PT Jatayu Alhadaya Bagadaya		Perubahan Pencatatan PKWT karyawan kami di lokasi PT Synthetic Rubber Indonesia	Sebagai persyaratan kepegawaian	Diberikan sebagian	Diberikan sebagian	04 Juni 2026	Ditaker
51	PPID-194C	19/05/2025	Tb Aji Fathallah	Karyawan Swasta	Tentang kegiatan makan dan minum Tahun Anggaran 2022-2024. Pertanyaan yang kami minta 1. Bagaimana aturan pengadaan makanan dan minuman di Sekretariat DPRD melalui e-katalog dari Tahun 2022-2024 [Terlampir] 2. Berapa besaran anggaran yang dilaksanakan untuk makan dan minum di setiap Sekretariat DPRD [Terlampir] 3. Apa saja jenis makanan dan minuman yang biasanya disediakan dalam kegiatan Sekretariat DPRD [Terlampir] 4. Bagaimana tata cara pengelolaan konsumsi makan dan minum saat rapat atau acara resmi di Sekretariat DPRD [Terlampir] 5. Apakah ada kebijakan khusus terkait konsumsi makan dan minum untuk pegawai Sekretariat DPRD seluruh kota [Terlampir] 6. Meminta salinan dokumen penganggaran kegiatan makan dan minum tahun 2022-2024 [Terlampir] 7. Meminta Salinan Basil pajak pendak kegiatan makan dan minum dari tahun. 2022-2024 di Sekretariat DPRD [Terlampir]	untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengetahui hasil dari badan publik yang telah dilaksanakan.	Diberikan sebagian	Diberikan sebagian	04 Juni 2026	Sekretariat DPRD Cilegon
52	PPID-240E	19/05/2025	Tb Aji Fathallah	Karyawan Swasta	Kegiatan Makan dan Minum dari tahun anggaran 2022-2024. Pertanyaan yang kami minta 1. Meminta Salinan Kwitansi Pada kegiatan tersebut dari tahun 2022- 2024 [Terlampir] 2. Meminta Dokumentasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024 [Terlampir] 3. Meminta Salinan Kwitansi Pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024 [Terlampir] 4. Bagaimana nama perusahaan yang terlelistasi pada kegiatan tersebut melalui e-katalog [Terlampir] 5. Berapa besaran anggaran yang dilaksanakan untuk makan dan minum di Setda Kota Cilegon dari tahun 2022-2024 [Terlampir] 6. Apa saja jenis makanan dan minuman yang biasanya disediakan dalam kegiatan makan dan minum di Setda Kota Cilegon dari tahun 2022-2024 [Terlampir] 7. Bagaimana tata cara pengelolaan konsumsi makan dan minum saat rapat atau acara resmi di Setda Kota Cilegon dari tahun 2022-2024 [Terlampir] 8. Bagaimana klasifikasi belanja makan dan minum bagi bendahara penerima, khususnya terkait PPh 22 atau PPh 23 atas jasa catering dari tahun 2022-2024 [Terlampir] 9. Bagaimana aturan terkait pengenaan PPh atas penyerahan makanan dan minuman oleh restoran. Apakah dibebaskan PPh atau Pajak Daerah [Pajak Hotel dan Restoran] dan bagaimana cara pengenaan PPh dan Pajak Daerah [Pajak Hotel dan Restoran] pada kegiatan makan dan minum di Setda Kota Cilegon [Pajak Hotel dan Restoran] 10. Bagaimana prosedur pajak makan dan minum sebesar 10% di daerah, dan apa dasar hukumnya? 12. Adakah peraturan khusus mengenai biaya makan dan minum harian bagi kepala daerah atau pejabat tertentu? 13. Bagaimana kriteria dan rincian makanan dan minuman yang diaplikasikan di hotel, restoran, atau oleh pengusaha jasa boga menurut peraturan yang berlaku? 14. Bagaimana tata cara pemotongan pajak makan minum sesuai dengan peraturan pemerintah?	untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengetahui hasil dari badan publik yang telah dilaksanakan.	Ditolak	Ditolak	28 Mei 2025	Bag Pemerintahan



53	PPID-1825E	19/06/2025	Tb. Aji Fathulih	Karyawan Swasta	<p>Bagian Mekanik dan Minum dari Tahun Anggaran 2022-2024, Pertanyaan yang kami minta, 1. Meminta Salinan Kwintansi Pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 2. Meminta Dokumentasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 3. Meminta nama perusahaan yg terakreditasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 4. Bagaimana aturan pengisian maknasan dan minimum maknasan pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 5. Apa saja jenis maknasan dan minimum yang biasanya di sediakan dalam kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2022-2024; 6. Bagaimana pelaksanaan dan minimum yang biasanya ada cara pengisian maknasan dan minimum saat rapat atau acara resmi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2022-2024; 7. Bagaimana klasifikasi biaya maknasan dan minimum bagi bendahara pemerintah, khususnya terkait PPh, 22 atau PPh, 23 atau jasa catering? 9. Bagaimana aturan atau persyaratan maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dari tahun 2022-2024; 10. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum saat rapat atau acara resmi di RSUD Kota Cilegon dari tahun 2022-2024; 11. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja? 12. Apakah peraturan khusus mengenai biaya maknasan dan minimum bagi kepala daerah atau pejabat tertentu? 13. Bagaimana kriteria maknasan dan minimum yang berlaku dari tahun 2022-2024; 14. Bagaimana tata cara penotongan pajak maknasan minum sesuai dengan peraturan pemerintah dari tahun 2022-2024?</p>	<p>Diberikan</p> <p>26 Juni 2025</p> <p>Dinas Kebudayaan</p>
54	PPID-1370C	19/06/2025	Tb. Aji Fathulih	Karyawan Swasta	<p>Kegiatan belanja makan dan minum T.A. 2022-2024 Pertanyaan yang kami minta, 1. Meminta Dokumentasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 2. Meminta kwintansi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 3. Meminta nama perusahaan yg terakreditasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 4. Bagaimana aturan pengisian maknasan dan minimum maknasan yang dikurangkan untuk maknasan dan minimum di setiap RSUD Kota Cilegon dari tahun 2022-2024; 5. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja? 6. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum saat rapat atau acara resmi di RSUD Kota Cilegon dari tahun 2022-2024; 7. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja? 8. Bagaimana klasifikasi belanja makan dan minum bagi bendahara pemerintah, khususnya terkait PPh, 22 atau PPh, 23 atau jasa catering? 9. Bagaimana aturan terkait pengisian PPh atau Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran)? 10. Bagaimana perlakuan pajak atas penyediaan maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja? 11. Bagaimana penempatan pajak maknasan dan minimum sebesar 10% di daerah, dan apa dasar hukumnya? 12. Apakah peraturan khusus mengenai maknasan dan minimum bagi kepala daerah atau pejabat tertentu? 13. Bagaimana kriteria maknasan dan minimum yang berlaku dari tahun 2022-2024; 14. Bagaimana tata cara penotongan pajak maknasan sesuai dengan peraturan pemerintah dari tahun 2022-2024</p>	<p>Diberikan</p> <p>12 Juni 2025</p> <p>RSUD</p>
55	PPID-157E	21/06/2025	Tb. Aji Fathulih	Karyawan Swasta	<p>Kegiatan belanja makan dan minum T.A. 2022-2024 Pertanyaan yang kami minta, 1. Meminta Dokumentasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 2. Meminta kwintansi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 3. Meminta nama perusahaan yg terakreditasi pada kegiatan tersebut dari tahun 2022-2024; 4. Bagaimana aturan pengisian maknasan dan minimum maknasan yang dikurangkan untuk maknasan dan minimum di setiap RSUD Kota Cilegon dari tahun 2022-2024; 5. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja? 6. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum saat rapat atau acara resmi di RSUD Kota Cilegon dari tahun 2022-2024; 7. Bagaimana perlakuan pajak maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja? 8. Bagaimana klasifikasi belanja makan dan minum bagi bendahara pemerintah, khususnya terkait PPh, 22 atau PPh, 23 atau jasa catering? 9. Bagaimana aturan terkait pengisian PPh atau Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran)? 10. Bagaimana perlakuan pajak atas penyediaan maknasan dan minimum bagi seluruh pegawai? Apakah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja? 11. Bagaimana penempatan pajak maknasan dan minimum sebesar 10% di daerah, dan apa dasar hukumnya? 12. Apakah peraturan khusus mengenai maknasan dan minimum bagi kepala daerah atau pejabat tertentu? 13. Bagaimana kriteria maknasan dan minimum yang berlaku dari tahun 2022-2024; 14. Bagaimana tata cara penotongan pajak maknasan sesuai dengan peraturan pemerintah dari tahun 2022-2024</p>	<p>Diberikan sebagai</p> <p>05 Juni 2025</p> <p>Bag Keora</p>

No	PPID	Tgl	Thoriq Aziz	Mahasiswa	ingin membuat baru AKI	sebagai syarat administrasi untuk meluluskan pekerjaan di perusahaan	Diberikan	Tgl	Dimasak
56	PPID-1952B	02/06/2025	Thoriq Aziz	Mahasiswa	Membuktikan berapa jumlah angka dan nama nama PNS perempuan di setiap Unit Kerja OPD Pemerintah Kota Cilegon yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.			26 Mei 2025	Dimasak
57	PPID-584E	23/06/2025	Dwi Riyanti	Mahasiswa			Diberikan	29-Apr-25	BRKPSDM
58	PPID-213C	02/06/2025	Aldi Haris Firdaus	Riayawan Swasta	Lowongan Kerja Industri untuk posisi kerja Safety/ISE atau lowongan kerja lainnya	Untuk mendapat peluang belajar di industri kota Cilegon	Diberikan	4 Juni 2025	Dimasak
59	PPID-896E	04/06/2025	Rio Prayoga Wanandri	Buruh Harian Lepas	Kegiatan makan dan minum di tahun 2023-2024. Apakah pengeluaran makan dan minum sudah sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia? Apakah pengeluaran tersebut didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai ketentuan, seperti buku pembayaran yang valid? Bagaimana proses verifikasi dan pengawasan pengeluaran makan dan minum dilakukan oleh bendahara dan pejabat terkait untuk mencegah kealihan dana dan penyalahgunaan? Apakah ada perbedaan antara pelaksanaan kegiatan makan dan minum seperti makan minum rapat, kegiatan, dan tamu? Apakah pengeluaran makan dan minum sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku? Berapa anggaran yang dihabiskan untuk makan dan minum dalam kegiatan rapat atau operasional di Dinas tersebut selama satu tahun atau periode tertentu? Apa jenis makanan dan minuman yang disediakan, serta apakah ada standar khusus terkait menu dan kualitasnya? Bagaimana mekanisme pengakuan makan dan minum, apakah melalui e-purchasing atau metode lain? Siapa pihak yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran dan pelaksanaan kegiatan makan dan minum di dinas tersebut? Apakah makan dan minum yang disediakan oleh pejabat atau kementerian/lembaga tertentu seperti peserta rapat atau pelayanan sosial? Bagaimana sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan anggaran makan dan minum tersebut?	untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbebas, akuntabel, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap berbagai penyelenggaraan negara	Diberikan sebagian	20 Juni 2025	BPXKPAD
60	PPID-420B	04/06/2025	Rio Prayoga Wanandri	Buruh Harian Lepas	Kegiatan makan dan minum di tahun 2023-2024. Apakah pengeluaran makan dan minum sudah sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia? Apakah pengeluaran tersebut didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai ketentuan, seperti buku pembayaran yang valid? Bagaimana proses verifikasi dan pengawasan pengeluaran makan dan minum dilakukan oleh bendahara dan pejabat terkait untuk mencegah kealihan dana dan penyalahgunaan? Apakah ada perbedaan antara pelaksanaan kegiatan makan dan minum seperti makan minum rapat, kegiatan, dan tamu? Apakah pengeluaran makan dan minum sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku? Berapa anggaran yang dihabiskan untuk makan dan minum dalam kegiatan rapat atau operasional di Dinas tersebut selama satu tahun atau periode tertentu? Apa jenis makanan dan minuman yang disediakan, serta apakah ada standar khusus terkait menu dan kualitasnya? Bagaimana mekanisme pengakuan makan dan minum, apakah melalui e-purchasing atau metode lain? Siapa pihak yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran dan pelaksanaan kegiatan makan dan minum di dinas tersebut? Apakah makan dan minum yang disediakan oleh pejabat atau kementerian/lembaga tertentu seperti peserta rapat atau pelayanan sosial? Bagaimana sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan anggaran makan dan minum tersebut?	untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbebas, akuntabel, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap berbagai penyelenggaraan negara	Diberikan sebagian	20 Juni 2025	Ditunduk
61	PPID-1443A	04/06/2025	Rio Prayoga Wanandri	Buruh Harian Lepas	Kegiatan makan dan minum di tahun 2023-2024	untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbebas, akuntabel, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap berbagai penyelenggaraan negara	Diberikan	20 Juni 2025	Diperikan
62	PPID-219D	06/06/2025	Rio Prayoga Wanandri	Buruh Harian Lepas	Kegiatan makan dan minum di tahun 2023-2024	untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbebas, akuntabel, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap berbagai penyelenggaraan negara	Diberikan	24 Juni 2025	Bagian Umum

63	PPID-6368	16/06/2025	Pipit Melia	Mahasiswa	Catatan Laporan Keuangan Daerah Kota Olegon tahun 2024	SBRPFI	Diberikan	4 Agustus 2025	BPKPAD
64	PPID-7588	23/06/2025	Arya Verawati	Mahasiswa	Data Pengunjung atau Nilai Okupansi Hotel-Hotel Yang Berada Di Kota Olegon	Penelitian Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Diberikan	11 Juli 2025	Disipenjar
65	PPID-3490	03/07/2025	Andri Prasetyo	Karyawan Swasta	Data pemenuhan keuangan daerah dan pemenuhan pajak, retribusi atau lainnya, dari PLTU di Kota Olegon dan bila ada perbanding dengan pemenuhan (pajak, retribusi atau lainnya) dari pembangkit energi terbarukan	untuk pembuatan info grafis	Diberikan sebagian	17 Juli 2025	BPKPAD
66	PPID-12640	09/07/2025	Jaka Darmawan	Pelajar/Mahasiswa	Studi Banding dari BPKAD Kab. Tulang Bawang Barat	Contak person untuk rencana kunjungan studi banding	Diberikan	18 Agustus 2025	BPKPAD
67	PPID-6830	25/07/2025	Ari Budi Suputra	Pelajar/Mahasiswa	Anggaran pemeliharaan truk/damrak dan berapa total unit yang aktif dan tidak aktif	Transparansi anggaran tahun 2023/2024 di DLH	Diberikan sebagian	14 Agustus 2025	Ditubuh
68	PPID-17628	25/07/2025	Ari Budi Suputra	Pelajar/Mahasiswa	Daftar-rebelsah penerima dana BOS/BOSDA di Kota Olegon tahun 2023/2024	Untuk mengetahui penyaluran dana BOS akurat dan akurat yang ada di lapangan	Diberikan	14 Agustus 2025	Ditubuh
69	PPID-336C	25/07/2025	Ari Budi Suputra	Pelajar/Mahasiswa	Berapa dana hibah yang diberikan tahun 2023/2024 dan apa saja bentuk hibahnya dari pemerintah pusat/daerah	Untuk mengetahui informasi yang akurat dan akurat yang ada di lapangan	Diberikan	12 Agustus 2025	BPKAD
70	PPID-10498	25/07/2025	Ari Budi Suputra	Pelajar/Mahasiswa	Anggaran PAD dari 1. parkir umum, 2. parkir khusus, 3. kariong-kariong parkir	Transparansi publik	Diberikan	08 Agustus 2025	Ditubuh
71	PPID-1786C	25/07/2025	Ari Budi Suputra	Pelajar/Mahasiswa	Anggaran mesin 2023/2024 bagi pasien dan pegawai RSUD	Untuk mengetahui berapa nilai total anggaran 2023/2024 untuk kegiatan tersebut	Diberikan Sebagian	14 Agustus 2025	RSUD
72	PPID-11888	25/07/2025	Ari Budi Suputra	Pelajar/Mahasiswa	Jumlah PKBM yang ada di Kota Olegon bentuk nama-nama PKBM tersebut berapa jumlah siswa yang lulus tahun 2023/2024 per PKBM yang ada di Olegon	Untuk mengetahui PKBM legal/ilegal	Diberikan	08 Agustus 2025	Ditubuh
73	PPID-647D	26/07/2025	Ari Budi Suputra	Pelajar/Mahasiswa	permohonan informasi dan data nama-nama penerima beasiswa full sarjana 2024	Untuk mengetahui siswa-siswa penerima beasiswa tepat sasaran apa tidak	Diberikan sebagian	09 Agustus 2025	Bagan Keru
74	PPID-11370	28/07/2025	PT. CERIA LASINDO NUSANTARA		Persyaratan pendaftaran NPWD dan reklame untuk store di CCM	Untuk persyaratan pendaftaran NPWD dan reklame untuk store di CCM	Diberikan	01 Agustus 2025	Bospetalrihang
75		01/08/2025	Bagus Ramadhan		Permohonan informasi penggunaan anggaran	Untuk pengurusan dan pemecahan BAK	Diberikan	25 September 2025	BPKAD
76		25/08/2025	Tb. Aj Fahulloh	Karyawan Swasta	kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 pada tahun anggaran 2022-2024 pada OPD Disporagur	Untuk mengetahui keterbukaan informasi karena mengacu ke us kip	diberikan	10 Oktober 2025	Disipenjar
77		25/08/2025	Tb. Aj Fahulloh	Karyawan Swasta	kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 pada tahun anggaran 2022-2024 di perkim	Untuk mengetahui keterbukaan informasi karena mengacu ke us kip	diberikan	08 Oktober 2025	Disipenkim
78		25/08/2025	Tb. Aj Fahulloh	Karyawan Swasta	kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 tahun anggaran 2022-2024	Untuk mengetahui keterbukaan informasi karena mengacu ke us kip	Diberikan sebagian	11 Oktober 2025	DLH
79		25/08/2025	Tb. Aj Fahulloh	Karyawan Swasta	kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 tahun anggaran 2022-2024	Untuk mengetahui keterbukaan informasi karena mengacu ke us kip	diberikan	10 Oktober 2025	Dinas Perhubungan
80		21/10/2025	Agung Maharta	Karyawan Swasta	Lampiran Perwal Olegon No. 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025	Penelitian	diberikan	19 November 2025	BPKPAD

81		11/11/2025	Narwilah	Karyawan Homorer	SK Walikota Cilegon tentang status jalan tahun 2022 Nomor:620/Kep.-19-DPUTR/2022.	Untuk mengetahui status jalan mana saja yang tercantum dalam SK tersebut agar apabila mengajukan pengaduan perihal jalan rusak tidak di tolak.	diberikan		26 November 2025	DPUTR
82		12/12/2025	Adha triliani	Mahasiswa	1. Apakah besar DPH membentuk forum CCSR yang melibatkan perusahaan, instansi pemerintah dan media? 2. Jika ya, apakah forum tersebut sudah resmi? 3. Apakah forum CCSR ini masih aktif?	skripsi	diberikan		29 Desember 2025	DUIH
83		23/12/2025	Cut Mutia Rahma	Mahasiswa	Dinas Sosial: 1. Batas Jumlah Anak terlantar dan kategori sejenisnya beserta sebarannya di setiap Kelurahan di Kota Cilegon. 2. Batas terkait anak yang berada dalam pendampingan dan layanan Dinas Sosial Kota Cilegon. Dinas Perkim: 1. Batas mengenai persebaran fasilitas bermain anak, ruang terbuka hijau dan sarana publik lainnya di seluruh Kelurahan di Kota Cilegon 2. Batas terkait kondisi, kenyamanan dan pemanfaatan fasilitas publik khusus anak di seluruh Kelurahan di Kota Cilegon	skripsi	diberikan		31 Desember 2025	Dinas sosial dan Dinas Perkim



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Di tahun 2025, tercatat tidak terjadi sengketa informasi.

100%



Keterangan : 0 Sengketa Informasi

KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kota Cilegon secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya:

KENDALA EKSTERNAL:

- Kurangnya pemahaman pemohon informasi terhadap prosedur permohonan informasi.
- Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tugas dan fungsi badan publik Pemerintah Kota Cilegon, sehingga permintaan informasi ditolak oleh PPID karena informasi tidak dikuasai atau masuk ke dalam Informasi yang Dikecualikan.

KENDALA INTERNAL:

- Jumlah staf pengelola layanan PPID dari unsur ASN yang belum memadai
- Belum optimalnya koordinasi dengan PPID Pelaksana



REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan di masa mendatang, yakni:

- Perlu diadakan Bimbingan Teknis bagi PPID Pelaksana
- Mengoptimalkan penggunaan media sosial resmi PPID Kota Cilegon untuk penyebaran informasi publik.
- - Perlunya pengembangan/pemutakhiran PPID Kota Cilegon melaksanakan portal/website

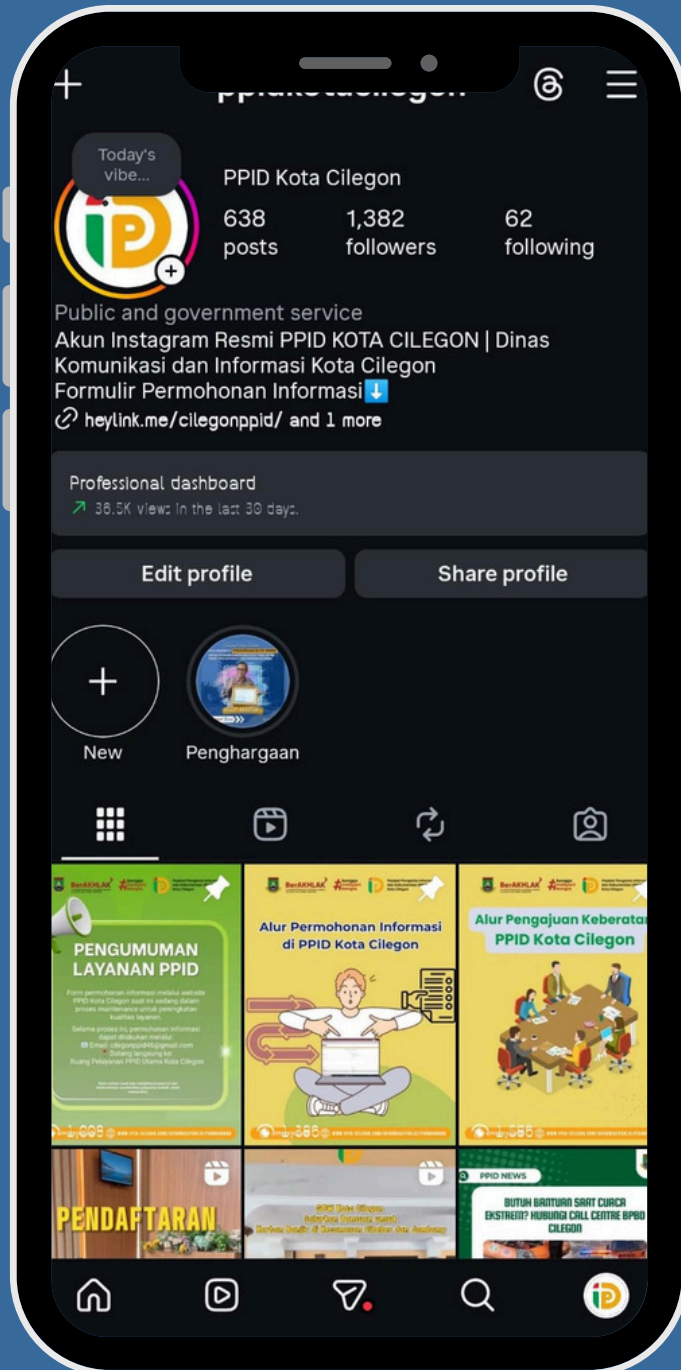


LAMPIRAN - LAMPIRAN





LAMPIRAN 1

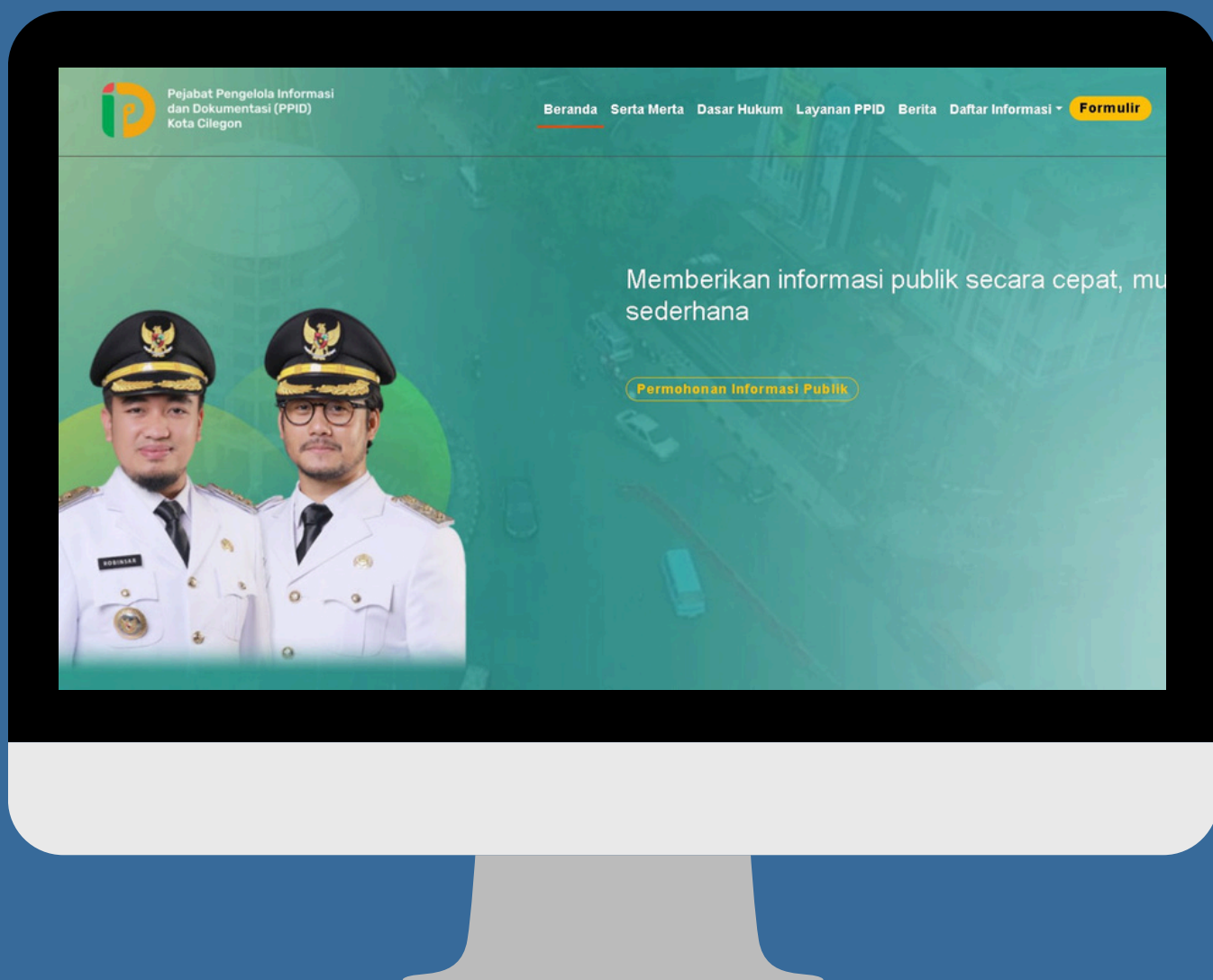


Instagram
@ppidkotacilegon





LAMPIRAN 2



Website
ppid.cilegon.go.id



LAMPIRAN 4

PROGRAM MANDIRI FM X PPID ON AIR KECAMATAN & KELURAHAN



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa **PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon

Mandiri FM X PPID Cilegon ON AIR KECAMATAN "CITANGKIL"

[@ppidkotacilegon](#) www.pp-id-cilegon.com/informasi/publik/permohonan



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa **PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon

Mandiri FM X PPID Cilegon ON AIR KECAMATAN "CIWANDAN"

[@ppidkotacilegon](#) www.pp-id-cilegon.com/informasi/publik/permohonan



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa **PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon

Mandiri FM X PPID Cilegon ON AIR KELURAHAN "KEBONSARI"

[@ppidkotacilegon](#) www.pp-id-cilegon.com/informasi/publik/permohonan



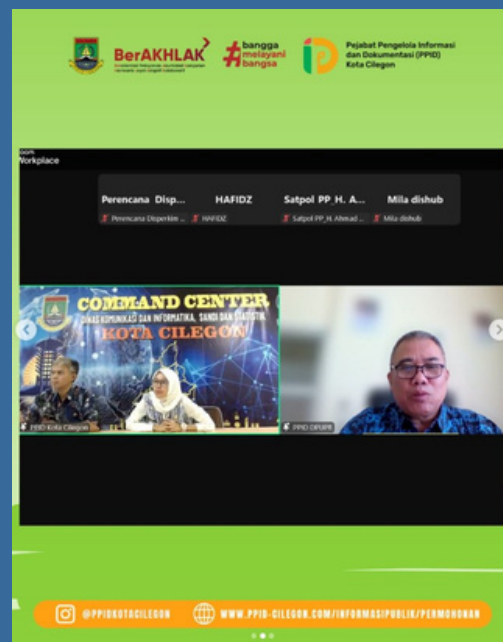
BerAKHLAK # bangga melayani bangsa **PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon

Mandiri FM X PPID Cilegon ON AIR KELURAHAN "TAMAN BARU"

[@ppidkotacilegon](#) www.pp-id-cilegon.com/informasi/publik/permohonan

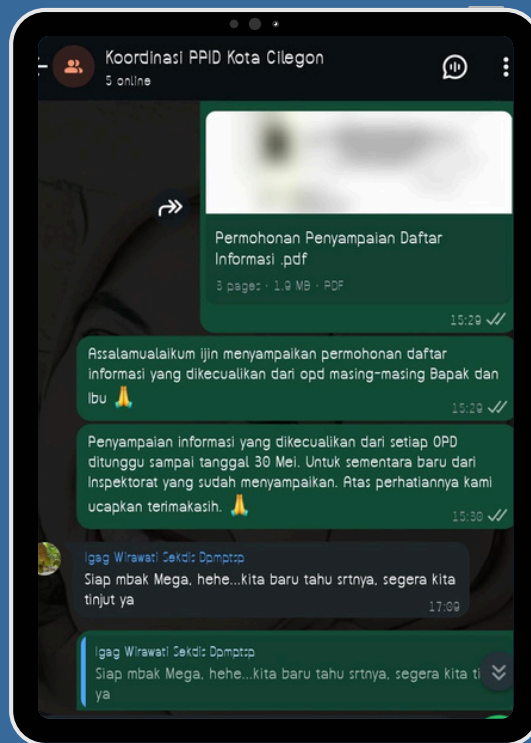
LAMPIRAN 5

SOSIALISASI & MONITORING PPID PELAKSANA VIA ZOOM



LAMPIRAN 6

KOORDINASI RUTIN DENGAN PPID PELAKSANA



LAMPIRAN 7

MONEV KI BANTEN 2025



Presentasi pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2025 di Kantor Komisi Informasi Banten, 21 Agustus 2025.



LAMPIRAN 8

MONEV KI BANTEN 2025



Tahapan visitasi pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Banten pada 9 September 2025.



LAMPIRAN 9

PENGANUGERAHAN KI BANTEN 2025



LAMPIRAN 10

PENGANUGERAHAN KI BANTEN 2025

